

GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI

Muhammad Ruhul Amin dan Kamarudin

Universitas Indonesia

Email: mhulamin17@gmail.com

Abstract. Aksi Bela Islam movement showed the 'umat' power involve democratization in Indonesia as a third big of democracy state in the world. Social movement that have characteristic such as solidarity for a same resistance showed by aksi Bela Islam movement fascinate. But, many accusation that this action contain political, make some big Islamic organization said that they not involved in this action directly, one of the organization is Muhammadiyah. Muhammadiyah is an Islamic organization be known by his role in education, health and social serviced, still should take the role as one of civil society power in the condition of 'umat' in Indonesia at that time. This draft analyze that how the Muhammadiyah take his different gesture and way by said not involved indirectly in organization. Using resources mobilization theory that one of factor in social movement, was found that Muhammadiyah's resources participate in social movement that materialized by Aksi Bela Islam. The member of Muhammadiyah, the facilities, and figure from some leader of Muhammadiyah participating of succes the Aksi Bela Islam movement. Muhammadiyah just take different way roled as civil society by involved indirectly in social movement with others Islamic organization. The research is using qualitative method.

Keywords: Aksi Bela Islam; Muhammadiyah; Social Movement; Resources Mobilization.

Abstrak. Gerakan Aksi Bela Islam menunjukkan kemampuan umat Islam dalam berdemokrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Gerakan sosial dengan ciri solidaritas untuk suatu penentangan yang sama ditunjukkan dengan cara mengagumkan lewat aksi Bela Islam. Namun banyaknya tudingan aksi ini bernuansa politis, membuat beberapa organisasi besar Islam menyatakan tidak melibatkan diri secara langsung dalam gerakan tersebut, salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi Islam yang berperan secara kultural lewat pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, harus mengambil peran sebagai *civil society* di tengah kondisi umat Islam di Indonesia saat itu. Tulisan ini mengurai bagaimana organisasi besar Islam Muhammadiyah mengambil sikap dan cara berbeda dengan menyatakan diri tidak terlibat secara langsung secara keorganisasian. Menggunakan teori mobilisasi sumberdaya yang menjadi salah satu faktor dalam gerakan sosial, ditemukan bahwa sumber daya Muhammadiyah turut serta dalam gerakan sosial yang terwujud dalam Aksi Bela Islam. Para warga Muhammadiyah, fasilitas dan ketokohan dari para tokoh Muhammadiyah ikut menyukseskan gerakan Aksi Bela Islam. Muhammadiyah telah mengambil cara lain berperan sebagai *civil society* dengan ikut secara tidak langsung dalam gerakan sosial bersama organisasi-organisasi Islam lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Aksi Bela Islam; Muhammadiyah; Gerakan Sosial; Mobilisasi Sumberdaya.

Pendahuluan

Pada penghujung tahun 2016, bertepatan dengan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, ibu kota tersebut ramai dengan gelombang massa yang melakukan aksi berjilid-jilid. Mereka menyebutnya Aksi Bela Islam. Aksi tersebut dilakukan pada 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta, yang menyinggung perasaan umat Islam dengan pernyataan *"jangan mau dibohongi pakai al-Maidah"*. Pernyataan tersebut dilontarkan Ahok ketika mengunjungi Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dalam rangka kampanye pada 27 September 2016. Berikut potongan transkrip ucapannya:

"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya — dibohongin pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka ama Ahok. Tapi programnya, gue kalo terima, gue gak enak dong ama dia, gue utang budi. Jangan. Kalo bapak ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena struk. (hadirin tertawa). Jadi ang.. bukan anggap. Ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalo yang benci sama saya, jangan emosi, terus dicolok, waktu pemilihan, colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. (hadirin tertawa). Jadi kalau benci sama saya, coloknya musti berkali-kali baru batal. Tapi kalo cuma sekali, eh kepilih lagi lu gua. Saya kira itu, jadi silahkan kalo mau tanya, terima kasih".

Bagi umat Islam, al-Maidah ayat 3 dipahami sebagai seruan untuk memilih pemimpin Muslim. Sehingga pernyataan Ahok tersebut dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Masyarakat Islam ibu kota tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Akibatnya pecahlah gelombang protes yang dikawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menuntut Ahok sebagai penista agama segera diproses hukum. Gelombang protes itu semakin diperparah oleh *framing* massa bahwa

Ahok seakan mendapat perlakuan khusus, yakni dalam proses penegakan hukumnya tidak secepat para pelaku penista agama sebelum-sebelumnya (Nur, 2017:2).

Seirama dengan tuntutan massa aksi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melalui kajian, menyuarakan pernyataan sikap dan pandangan keagamaan dengan menegaskan bahwa pernyataan Ahok dikategorikan: (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Sebab itu, MUI meminta pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi ini diikuti oleh banyak ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Dewan Dakwah dan Persatuan Islam. NU dan Muhammadiyah – sebagai dua organisasi besar Islam di Indonesia – tidak ikut serta. Tetapi terutama Muhammadiyah, meskipun tidak secara resmi ikut aksi, tapi banyak tokoh-tokohnya yang bahkan ikut menjadi penggerak aksi, seperti Bachtiar Nasir dan Yunahar Ilyas. Banyak massa aksi dari Muhammadiyah dan hal ini menimbulkan keterkejutan dari pengamat. Qodir (2017) mempertanyakan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang moderat tiba-tiba jamaahnya terlibat dengan gerakan yang oleh sebagian pengamat Islam disebut sebagai gerakan radikal.

Penelitian ini melihat bagaimana sebenarnya keterlibatan para tokoh dan anggota atau warga dari Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan utama *civil society* di Indonesia ikut serta dalam suatu aksi yang dimotori oleh kelompok lain, dimotori oleh tokoh utama Rizieq Shihab yang selama ini dikenal kurang toleran. Terlebih juga gerakan Muhammadiyah yang cenderung elegan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya melalui amal usahanya, seketika para tokoh dan anggotanya ikut dalam arus aksi massa dalam gerakan sosial tertentu.

Penelitian ini kualitatif yakni bertujuan memahami kompleksitas fenomena yang diteliti, berusaha menggali, menemukan, dan memahami pemaknaan akan kebenaran dari suatu fenomena yang diteliti (Sarosa, 2012: 34) yakni mengenai

mobilisasi sumber daya dari Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan *civil society* di Indonesia dalam suatu gerakan sosial di Indonesia yakni Aksi Bela Islam 411 (4 November 2016), dan Aksi Bela Islam 212 (2 Desember 2016).

Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini: (1) teori *civil society*, dan (2) teori gerakan sosial, dan teori mobilisasi sumber daya. Teori *civil society* berguna untuk menjelaskan komponen-komponen yang dimiliki Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan *civil society*, meliputi: *voluntary*, *self generating*, *self supporting*, kemandirian dan keterikatan dengan norma hukum. Seberapa lengkap dan kuat komponen yang dimiliki Muhammadiyah, sehingga berpengaruh pada keberanian bersikap kritis terhadap pemerintah (Culla, 2006: 56-57). *Social movement theory* berguna untuk menjelaskan fenomena aksi Bela Islam 411 dan 212, bagaimana solidaritas dan penentangan yang sama terbentuk untuk berhadapan dengan pihak berwenang. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya, sebagai teori utama dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana keterlibatan Muhammadiyah yang ikut menyukseskan aksi tersebut dengan melihat sumber daya apa saja digunakan.

Civil Society

Konsep *civil society* berkembang dari masa ke masa, mulai dari Hobbes dan Locke hingga Alex. D Tocqueville. *Civil society* pada masa awal terkait dengan hubungannya dengan negara, dan Hobbes menganggap *civil society* berada dalam cengkraman erat negara yang memerintah secara absolut. Pemikir liberal demokrasi yang kemudian muncul seperti Locke menganggap *civil society* sebagai masyarakat yang mempunyai hak dasar hidup, bebas dan hak milik (Hikam, 2000: 128-129).

Konsep *civil society* yang banyak diikuti berasal dari pemikir Perancis, Alexis de Tocqueville, yang melakukan penelitiannya di Amerika Serikat. Tocqueville menyatakan bahwa *civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 2000: 129-130).

Menurut A.S Hikam (2001: 123-131) *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, serta tak terkungkung akan kehidupan

material, dan juga tak terserap oleh dan ke dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalam *civil society* terdapat syarat penting yang tersirat yakni suatu ruang publik yang bebas (*free public sphere*). Suatu ruang yang menjamin berlangsungnya komunikasi yang bebas dilakukan warga masyarakat. Hikam juga menyatakan komunikasi dan jalinan antar warga yang bebas tersebut mewujudkan dalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan merupakan hasil dari pengejawantahan *civil society*.

Oleh sebab itu, ciri utama dari *civil society*, antara lain: (1) Kemandirian yang tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat; (2) Ruang publik yang bebas bagi keterlibatan politik aktif dari warganegara untuk kepentingan masyarakat sendiri; dan (3) Kemampuan membatasi kuasa negara agar tak mengintervensi hak-hak warga negara atau bertindak secara otoriter.

Gerakan Sosial

Menurut Tarrow dalam Oman Sukmana (2016: 4-5), gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Pendapat Tarrow memiliki beberapa turunan, yaitu: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elite; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan gerakan sosial.

Menurut Greene dalam Sukmana (2016: 5-6), gerakan sosial adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan lama, terstruktur, dan rasional. Greene menyebut beberapa ciri gerakan sosial yakni (1) adanya sejumlah orang; (2) tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan; (3) adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum, dan adanya aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.

Freeman dalam Sukmana (2016: 6) mendapatkan gambaran bahwa gerakan sosial

harus terdapat syarat-syarat sebagai berikut: (1) ada suatu jaringan komunikasi yang didapat; (2) memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan, bersamaan dengan; (3) adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan; dan (4) adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok-kelompok yang tertarik (*interested groups*) ke dalam suatu gerakan.

Sujatmiko, dikutip Sukmana (2016: 3), menyatakan bahwa gerakan sosial adalah bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.

Teori Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi menurut Oberschall, dikutip Oman Sukmana (2016: 154-156), mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. Pichardo menyatakan terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumber daya mengenai proses terjadinya suatu gerakan sosial yakni: sumber daya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*). Menurut Karl Dieter-Opp (2009: 135), sumber daya terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup, juga bisa mengenai kepemilikan properti seperti rumah atau gedung, pengetahuan, dan *skill* (keahlian) yang dimiliki oleh aktor, termasuk di dalamnya ideologi dan nilai gerakan.

Mancur Olson, dikutip Rajendra Singh (2002), menyatakan bahwa struktur mobilisasi berfokus pada peranan faktor-faktor objektif tertentu sebagai kepentingan, organisasi, sumber daya, strategi dan kesempatan dalam setiap mobilisasi kolektif skala besar. Menurut McCharty yang dikutip Sukmana (2016: 195-196), konsep struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan repertoar rancangan gerakan sosial. Sederhananya, struktur mobilisasi adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial.

McCharty dikutip Sukmana (2016: 196) menyatakan terdapat empat dimensi struktur mobilisasi yang tergambar pada tabel di bawah ini:

Dimensi Struktur Mobilisasi		
	Non-Gerakan (<i>NonMovement</i>)	Gerakan (<i>Movement</i>)
Tidak resmi (informal)	Jaringan Pertemanan (<i>Friendship Networks</i>); Lingkungan Tempat Tinggal (<i>Neighborhoods</i>); Jaringan Kerja (<i>Work Networks</i>).	Jaringan Aktivist (<i>Activist Networks</i>); Kelompok-Kelompok Kesamaan (<i>Affinity Groups</i>); Komunitas Memori (<i>Memory Communities</i>)
Resmi (formal)	Gereja (<i>Churches</i>); Gabungan-Gabungan (<i>Unions</i>); Asosiasi Profesional (<i>Professional Associations</i>)	Organisasi Gerakan Sosial (SMOs); Komite-Komite Protes (<i>Protest Committees</i>); Lembaga-Lembaga Gerakan (<i>Movement Schools</i>)

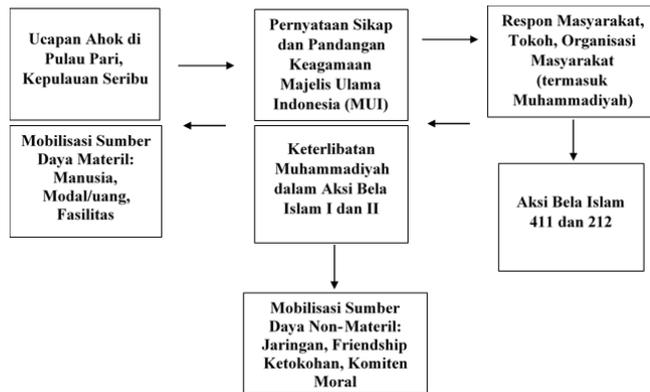
McCharty dan Zald dalam Sukmana (2016: 198) memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial adalah suatu gerakan organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*).

McCharty dan Zald membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumber daya seperti uang (*money*), fasilitas dan tenaga kerja (*facilities and labor*), dan legitimasi (*legitimacy*). McCharty dan Zald juga menyatakan bahwa perspektif mobilisasi sumberdaya (*resources mobilization*) menempatkan beberapa sumber daya dalam masyarakat seperti semua level pemerintahan (*all level government*), yayasan-yayasan (*foundations*), institusi keagamaan (*religious institutions*), dan konstituen ikhlas/baik hati (*conscience constituencies*), kelompok-kelompok yang mendukung tujuan gerakan (*groups that support the movement's goals*). Hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa sumber daya bukan hanya berupa barang-barang yang berwujud (*tangible*) seperti uang dan fasilitas (*money and facilities*), tetapi juga meliputi institusi dan kelompok (*institutions and groups*). Selain itu sumber daya juga meliputi akses kepada media (*access to media*), dukungan simpatisan (*support by sympathizers*), loyalitas kelompok atau anggota

(*loyalty of groups or members*), loyalitas kelompok atau anggota (*loyalty of groups or members*), kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor (*availability of rooms for meeting or office work*), hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari actor (Sukmana, 2016: 200).

Dengan memadukan tiga pendekatan teori di atas, maka alur berpikir penelitian dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:

Alur Berpikir



Muhamadiyah sebagai salah satu kekuatan *civil society* di Indonesia dijadikan objek identifikasi dalam permasalahan penelitian ini karena keterlibatan anggotanya secara nyata pada aksi Bela Islam 411 dan 212. Permasalahan didapat ketika Muhammadiyah secara formal menyatakan tidak terlibat dalam aksi tersebut, tetapi para anggotanya ikut serta memeriahkan dan mensukseskan aksi tersebut. Lalu yang utama adalah melihat dan mengurai keterlibatan sumber daya Muhammadiyah dalam aksi tersebut. Sumber daya yang dimaksud terbagi dalam dua kategori yakni sumber daya materil dan sumber daya non-materil. Sumber daya materil berupa massa, uang dan modal, sedangkan sumber daya non-materil jaringan, pertemanan (*friendship*), dan ketokohan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatori. Menurut Neuman (2003), penelitian eksplanatori dilakukan berdasarkan penelitian eksplorasi dan deskripsi dan berlanjut untuk mengidentifikasi alasan terjadinya suatu hal, biasanya menjawab pertanyaan "kenapa/mengapa". Penelitian eksplanatori juga dimulai dengan membuat garis besar mengenai teori yang telah ada dan mengujinya atau mengembangkannya. Untuk pengumpulan data, penulis fokus pada penjelasan mengenai keterlibatan warga Muhammadiyah dalam gerakan

sosial Islam aksi 411 dan 212 melalui warga yang terlibat, tokoh dan para pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Penulis juga menggunakan batasan penelitian berdasarkan lokasi, informan, peristiwa, proses dan pertimbangan etis (Creswell, 2014).

Untuk lokasi penulis memfokuskan pada Muhammadiyah di tingkat pusat yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, serta juga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode triangulasi data, menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:24) merupakan "*the aim is not to determinate the truth about the sama social phenomenon rather than the purpose of trangulation is to increase one's understanding of what ever is being investigated*".

Wajah Gerakan Muhammadiyah

Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah telah banyak diteliti. Ada penelitian yang diarahkan untuk melihat tiga konteks epistemologi keilmuan dari Muhammadiyah mulai dari kurun waktu 1912-1950 (ditandai perdebatan fiqhiyah, tradisi dan mitologi), kurun 1950-2000 (Muhammadiyah dalam ranah *modern islamic studies*), dan kurun 2000-an hingga sekarang (Jinnan, 2015). Penelitian dari Tahir (2010), Elhady (2017) dan Syamsyuddin (2017) menunjukkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang fokus pada pendidikan dan pelayanan sosial. Zuhri (2017) membuktikan bahwa Muhammadiyah merupakan *civil society* utama Indonesia yang mandiri dan menjadi kekuatan penyeimbang negara dengan melakukan fungsi sebagai *counterbalancing the state*.

Muhammadiyah dipandang menampilkan wajah yang ambivalen terkait pluralisme, liberalisme dan islamisme. Di tubuh Muhammadiyah, terdapat dua kelompok kecil yang berlawanan: kelompok puritan dan progresif (Ahmad Najib Burhani, 2018). Najib (2010) menyebut bahwa faksi puritanisme berakar dari pengaruh kuat Haji Rasul (ayahnya Buya HAMKA) dari Suamtera Barat. Pengaruh Haji Rasul memberikan wajah "kaku" dari Muhammadiyah dalam melihat praktik keagamaan terutama ketika bersinggungan dengan budaya lokal. Dan dewasa ini, masih ditemukan di Muhammadiyah faksi puritan yang "kaku" dengan penganut agama lain (Qodir, 2017).

Dalam konteks keterlibatan Muhammadiyah dalam Aksi Bela Islam I dan II, Qodir berpendapat

bahwa faksi puritanisme yang mengawal dan menggiring anggota Muhammadiyah untuk ikut serta dalam Aksi Bela Islam I dan II. Tokoh Muhammadiyah yang berperan melakukan hal tersebut adalah Yunahar Ilyas dan Bachtiar Nasir yang juga merupakan pimpinan MUI Pusat. Terutama Bachtiar Nasir, dia merupakan sosok yang berperan penting dalam memobilisasi sentimen warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam aksi-aksi yang terjadi di silang Monas. Di internal organisasi Muhammadiyah, ia menduduki jabatan sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah periode 2015-2020 (Qodir, 2017).

Di internal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) – sebagai penggerak utama aksi Bela Islam – Bachtiar Nasir juga merupakan sosok yang berpengaruh. Ia merupakan figur penting dan menonjol di tengah ribuan bahkan jutaan massa yang bergerak. Bisa dikatakan, ia figur penting lain selain Riziq Shihab. Bila dilihat dari struktur komposisi kepemimpinan di tubuh GNPF-MUI, maka terlihat: Habib Rizieq sebagai pembina, Bachtiar Nasir (Muhammadiyah/MUI) sebagai ketua, Mishabul Anam (FPI) sebagai wakil ketua I; Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah/MUI) sebagai wakil ketua II; Muhammad al-Khaththath (FUI) sebagai sekretaris jenderal; dan Munarman (FPI) sebagai panglima lapangan (Ichwan, 2016: 97).

Tokoh Muhammadiyah lainnya yakni Amien Rais, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1994-1998 dan juga dikenal sebagai tokoh reformasi, mendukung jalannya aksi bela Islam tersebut. Amien Rais bahkan memimpin sendiri aksi massa yang berangkat dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di Jalan Menteng Raya No. 62. Dalam khutbah yang disampaikan Amien Rais sesaat sebelum aksi dimulai, menyebutkan bahwa kasus pernyataan Ahok tentang al-Maidah 51 adalah “momentum yang diberikan Allah kepada umat Islam” untuk mengalahkannya dalam Pilkada dan momentum kebangkitan umat Islam (Najib, 2016: 19-20).

Oleh sebab itu, dengan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam aksi Bela Islam, baik yang terlibat di internal GNPF-MUI atau di luar itu, hal itulah yang menjadi penggerak keterlibatan warga Muhammadiyah. Bahkan Najib menegaskan bahwa keikutsertaan para warga Muhammadiyah, termasuk para Ketua PDM, bukan disebabkan oleh faktor-faktor kepemimpinan dari luar Muhammadiyah seperti figur Habib Rizieq Shihab, melainkan disebabkan oleh tokoh-tokoh internal Muhammadiyah sendiri. Najib memandang bahwa

figur kepemimpinan dari Rizieq hanya bersifat “accidental” atau “incidental” belaka. Rizieq tidak akan mampu mempertahankan peran yang demikian pasca aksi tersebut (Najib, 2016: 24).

Selain di GNPF-MUI, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga banyak yang menduduki posisi-posisi penting di tubuh MUI. Ada Prof. Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ustad Bachtiar Nasir (UBN) menjabat sebagai wakil sekretaris Dewan Pembina MUI. Anwar Abbas yang juga menjadi salah satu ketua di Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjabat sebagai sekretaris jenderal MUI. Lalu juga ada ustad Prof. Yunahar Ilyas yang menjabat sebagai wakil ketua MUI. Selain tokoh-tokoh penting tersebut juga ada nama Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Azrul Tanjung, dan Alpha Amirachman di tubuh MUI Pusat.

Manakala MUI mengambil sikap tegas melalui pernyataan sikap keagamaannya yang menyebutkan bahwa Ahok telah melakukan “penodaan al-Qur’am dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam” yang diikuti oleh gerakan untuk mempopulerkannya sebagai fatwa oleh GNPF-MUI, pernyataan itu segera menjadi pendorong penting bagi menguatnya mobilisasi aksi Bela Islam. GNPF-MUI terus-menerus memperluas dan menguatkan gema dari pernyataan resmi MUI tersebut, mengadvokasinya melalui berbagai media, forum, dan jaringan. Bahkan menurut Nur Ichwan (2016), tanpa legitimasi “fatwa MUI”, gerakan aksi Bela Islam tidak dapat dibayangkan akan mendapatkan simpati dan dukungan dari umat Islam secara luas.

Jika melihat dari posisi-posisi penting figur Muhammadiyah di MUI, fatwa resmi dari MUI tersebut segera memberi petunjuk kuat bahwa figur-figur Muhammadiyah secara tidak langsung mendukung fatwa tersebut. Bahkan boleh jadi, di antara mereka yang mengusulkan dan menguatkan fatwa tersebut. Ini semakin memperkuat alasan mengapa anggota Muhammadiyah yang lain menjadi terlibat begitu antusias mendukung aksi Bela Islam.

Terlepas dari keterlibatan para tokoh-tokohnya di dalam aksi Bela Islam, sikap resmi dari PP. Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang mendua. Hal ini ditunjukkan dengan himbuan yang secara resmi dikeluarkan oleh PP. Muhammadiyah. Di satu, PP menghimbau agar para anggota Muhammadiyah tidak perlu ikut aksi. Tetapi pada saat yang sama, PP juga tidak melarang para anggotanya untuk terlibat aksi. Tidak menghimbau terlibat dan tidak melarang, itulah sikap mendua yang ditunjukkan oleh sikap resmi PP.

Muhammadiyah. Tetapi, terlepas dari sikap itu, PP secara tegas melarang peserta aksi menggunakan atribut organisasi.

“Muhammadiyah secara kelembagaan tidak ikut serta dan terlibat dalam aksi unjuk rasa 4 November. Adapun warga Muhammadiyah memiliki hak demokrasi untuk demo selaras dengan misi dakwah amar makruf nahi munkar yang pelaksanaannya harus sejalan dengan Khittah dan Kepribadian. Karena itu bagi warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi demonstrasi harus memahami sepenuhnya bahwa keikutsertaannya merupakan sikap pribadi sehingga tidak diperkenankan membawa atribut Muhammadiyah, terutama bendera, menggunakan fasilitas dan dana Persyarikatan untuk kepentingan demonstrasi.” (Najib, 2016: 19)

Di tingkat kepengurusan bawah Muhammadiyah, Najib (2016) menemukan juga adanya ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang berbasiskan wilayah kabupaten/kota yang ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Namun Najib tidak mendalami lebih lanjut, apakah ketua PDM tersebut juga ikut memfasilitasi warga Muhammadiyah yang berada pada basis wilayahnya untuk ikut berpartisipasi dalam aksi Bela Islam tersebut. Latar belakang keikutsertaan mereka, selain terdorong oleh banyaknya figur-figur Muhammadiyah pusat yang ikut aksi, juga didorong oleh psikologi kebencian kepada sosok Ahok. Mereka – para PDM ini – tergerak ikut aksi dilatarbelakangi oleh perasaan benci akibat agama Islam, khususnya terkait QS. Al Maidah, yang dihina dan diremehkan oleh Ahok.

Bagi Qodir (2016), bukti-bukti keterlibatan banyak figur penting Muhammadiyah dan para Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di dalam aksi Bela Islam serta jajaran anggotanya memperlihatkan bahwa sejatinya Muhammadiyah memberi dukungan luar biasa besar terhadap aksi Bela Islam meskipun secara resmi tidak ada atribut organisasi di tengah aksi tersebut. Sebagian anggota menyayangkan sikap PP yang tidak tegas antara tidak mendukung dan tidak melarang. Sebab sikap itu memberi leluasa kepada PDM memobilisasi anggotanya. Misalnya, Pemuda Muhammadiyah di tingkat provinsi atau wilayah seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali memobilisasi anggotanya. Bahkan, melalui wawancara Qodir (2016) dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Jawa Barat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Muhammadiyah sebagai berikut:

“Kepemimpinan Muhammadiyah saat ini perlu menata manajemen penokohan agar muncul di pentas nasional dalam rangka memunculkan kader-kader Muhammadiyah. Kemunculan tokoh-tokoh ini akan memantapkan ghiroh Kelslaman bagi umat Islam. Dari sana Muhammadiyah dapat muncul sebagai leader dalam panggung nasional, bukan FPI. Bila FPI yang di depan menjadi pemimpin, pertanggungjawaban tidak jelas dan juga pertanggungjawaban kemana itu tidak diketahui. Dengan Gerakan Berjamaah dan Koperasi Syariah 212, yang sudah ada saat ini walaupun digerakkan oleh GNPF-MUI, namun Muhammadiyah dapat mengambil energi positifnya dari Umat Islam untuk diarahkan menuju dakwah perjuangan Muhammadiyah dalam kerangka merespon kondisi kebangsaan saat ini”.

Tingginya animo warga Muhammadiyah untuk ikut serta dalam aksi Bela Islam termasuk juga dari angkatan Muda Muhammadiyah, membuat beberapa anggota PP Pemuda Muhammadiyah berinisiatif membentuk suatu wadah baru yang bisa memfasilitasi warga persyarikatan. Mashuri, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang KOKAM dari PP Pemuda Muhammadiyah, berinisiatif mendirikan wadah baru dengan nama yang mirip dengan bidang yang diketuainya di struktural PP Pemuda Muhammadiyah yakni GN-KOKAM. KOKAM dalam struktural Pemuda Muhammadiyah adalah akronim dari “Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah”. Sedangkan KOKAM yang dibentuk kemudian adalah singkatan dari “Komando Kawal al-Maidah”, lalu ditambahkan GN singkatan dari Gerakan Nasional, untuk membuat akronimnya menjadi beda dengan KOKAM di struktural resmi Pemuda Muhammadiyah. Sedangkan al-Maidah, merujuk pada surah dalam al-Qur’an yang disebut Ahok dalam pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Menurut Mashuri, perlu ada yang mengambil peran untuk memfasilitasi dan mengordinir para kader dan anggota Muhammadiyah dari daerah-daerah di luar Jabodetabek. GN-KOKAM tidak pernah mengundang para anggota dan kader Muhammadiyah dari luar daerah tersebut, para warga Muhammadiyah itu sendiri yang mendaftarkan diri ke GN-KOKAM untuk dikordinir. Para anggota dan kader Muhammadiyah yang mendaftar tersebut juga banyak mengatasnamakan

komunitas pengajian atau masjid di basis mereka masing-masing. Mashuri menyatakan:

"Kami samasekali tidak pernah mengundang (mereka), mereka yang meregister diri, kami dari daerah ini... kami dari cabang ini... kami dari ranting ini... mereka datang 2 bus, ada yang satu bis, ada yang datang naik kereta, ada yang berombongan menggunakan mobil pribadi. Semua datang atas inisiatif bersama (di daerah)" (wawancara pribadi dengan Mashuri, 19 April 2020).

Selain itu, dukungan Muhammadiyah tidak hanya terlihat dari keterlibatan tokoh atau anggotanya. Hal yang juga penting dicatat, Muhammadiyah juga ikut membantu dari segi sarana yang penting bagi aksi. Demi memfasilitasi warga Muhammadiyah yang datang dari berbagai daerah untuk ikut aksi, disediakan gedung kantor PW Muhammadiyah DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 49. Dalam kompleks kantor PWM DKI terdapat juga fasilitas pendidikan atau sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Semua ruangan di kantor dan juga sekolahan tersebut difungsikan sebagai posko yang memfasilitasi waga Muhammadiyah dan umat Islam lainnya yang ikut aksi Bela Islam pada 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212). Sedangkan yang menjadi organizer di sana adalah Gerakan Nasional Komando Kawal al-Maidah yang dipimpin oleh Mashuri.

Kompleks PWM DKI Jakarta tersebut menampung tidak kurang dari 5.000 orang untuk difasilitasi akomodasi dan konsumsi mereka. Para peserta aksi difasilitasi untuk tidur dan kebutuhan mandi mereka. Sedangkan untuk konsumsi, disediakan sesuai dengan persediaan dari bantuan yang datang. Konsumsi tidak lah menjadi persoalan untuk GN-KOKAM, karena para peserta aksi yang difasilitasi oleh GN-KOKAM telah diimbau untuk melakukan persiapan dengan mandiri. GN-KOKAM fokus pada koordinasi mereka saat aksi dan juga akomodasi di kompleks kantor PWM DKI Jakarta tersebut.

Selain kantor PWM DKI Jakarta, Nuswantoro sebagai sekretaris umum PWM DKI, mengatakan terdapat belasan sekolah yang radiusnya tidak terlalu jauh dari lokasi aksi bela Islam. Sekolahan tersebut juga digunakan untuk menampung dan memfasilitasi warga Muhammadiyah lainnya yang berasal dari luar Jabodetabek. Koordinasinya tidak lagi dengan GN-KOKAM, melainkan dengan cabang atau ranting tempat sekolah Muhammadiyah itu berada. Lalu, juga terdapat setidaknya 10 kompleks masjid yang berada tak jauh dari Monas. Masjid juga difungsikan sebagai tempat transit para peserta aksi

yang berasal dari daerah-daerah luar Jabodetabek. Selain tentunya juga sebagai titik kumpul para peserta aksi sebelum menuju lokasi aksi Bela Islam di Monas.

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah fasilitas kesehatan yang disediakan oleh seluruh rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta. Terdapat lima rumah sakit Muhammadiyah yang mengirimkan tim medisnya beserta ambulans untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan oleh para peserta aksi. Mashuri menyatakan semua rumah sakit itu ikut turun karena adanya keramaian massa, dikhawatirkan banyak yang mengalami penurunan fisik dan hal lainnya terkait dengan kesehatan. Jika dirinci seluruh rumah sakit tersebut mengirimkan dokter, perawat, obat-obatan dan juga ambulans. Rumah sakit tersebut turun juga dengan alasan kemanusiaan, bahwa ada kerumunan massa yang berpotensi besar membutuhkan pertolongan atau penanganan medis seketika (wawancara pribadi, 19 April 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam aksi bela Islam terlihat dari beberapa aspek. *Pertama*, pengaruh legitimasi formal (*legitimacy*) organisasi dalam turut hadirnya sejumlah anggota Muhammadiyah terutama yang bermukim di sekitar Jabodetabek. Muhammadiyah melarang warganya untuk menggunakan atribut organisasi, tetapi tidak melarang warganya ikut berpartisipasi karena merupakan hak warga negara dalam mengekspresikan pendapat. Sikap resmi Muhammadiyah yang bersifat diplomatis tersebut justru menghadirkan kenyataan banyaknya warga Muhammadiyah yang menjadi massa aksi (*mass/labor*) baik yang secara bersamaan berada di struktural (pengurus) maupun secara kultural di Muhammadiyah.

Kedua, peran dari ketokohan (*authority*) Muhammadiyah yang ikut serta menggeret massa dari anggota Muhammadiyah sendiri, seperti: Yunahar Ilyas (Komisi Fatwa MUI), Anwar Abbas (Sekretaris Jendral MUI), Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI) dan Bachtiar Nasir (GNPF-MUI). Keempatnya merupakan tokoh dalam persyarikatan Muhammadiyah, tetapi juga berperan dalam gerakan aksi Bela Islam 411 dan 212 dengan porsi dan posisi masing-masing. Selain itu, tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Amien Rais juga mengambil peran memimpin aksi massa dalam gerakan tersebut.

Ketiga, turut sertanya organisasi otonom di tingkat pusat dan pimpinan wilayah dan daerah di bawah struktural Muhammadiyah dalam aksi tersebut. Organisasi otonom mempunyai wewenang untuk melakukan beberapa tindakan dan gerakan dengan syarat tidak bertentangan dengan pandangan dan keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Keikutsertaan organisasi otonom yakni Pemuda Muhammadiyah tersebut dilakukan oleh ketua umum dan pengurus tingkat pusat lainnya, begitu juga dengan pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah lainnya membuat institusi (*institutions*) mereka terlibat.

Keempat, jaringan pertemanan (*friendship*) dari Muhammadiyah yang diduga juga akan ikut membawa simpati Muslim lainnya. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi besar Islam yang berbasis di perkotaan, dan didominasi kelas menengah, tentu cukup disegani dan menjadi panutan bagi Muslim disekitar, sehingga dapat pula menarik Muslim lainnya untuk ikut dalam gerakan aksi Bela Islam 411 dan 212. *Kelima*, fasilitas (*facilities*) dari Muhammadiyah juga turut ambil bagian dalam aksi Bela Islam yakni ambulance dari PKU DKI Jakarta. Walaupun alasan keikutsertaan ambulance dan tentunya tim medis yang menyertainya adalah alasan kemanusiaan.

Kehadiran dan keikutsertaan sumber daya dari Muhammadiyah yaitu para tokoh dan warga Muhammadiyah di berbagai tingkatan serta juga turut sertanya fasilitas lain dari Muhammadiyah yakni ambulance PKU DKI Jakarta, membuktikan Muhammadiyah telah mengambil corak atau cara lain sebagai *civil society* di Indonesia dengan jalur gerakan sosial. Keterlibatan tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah telah mengambil cara lain berpartisipasi sebagai *civil society* bagi umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah yang terkenal lewat jalur kultural dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Pada era-Reformasi juga mengambil jalur partisipasi lewat gerakan sosial Aksi Bela Islam bersama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Daftar Pustaka

Burhani, Ahmad Najib. 2008. *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
 Creswell, John W. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methodes Approach*. 4th. Ahmad fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Penerjemah). 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif,*

Kuantitatif dan campuran. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Culla, Suryadi Adi. 2006. *Rekontruksi Civil Society: wacana dan aksi ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
 Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratitasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
 Mc Adam, Doug, dkk. 1966. *Comparative on Social Movement: Political Oppurtunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. New York: Cambridge University Press.
 Neuman, W Lawrence. (2003) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Edina T. Sophia (Penerjemah). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks, 2017.
 Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: INDEKS.
 Singh, Rajendra. "Teori-teori Gerakan Sosial Baru", dalam Mansour Fakhir dkk, 2002. *Menuju Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Insist Press.
 Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
 Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
 Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama*. Jakarta: Daulat Press.

Jurnal

- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Maarif*. Vol. 11 No. 2.
 _____ .2017. "Menegosiasikan KeIndonesiaan dan KeIslaman". *Maarif*. Vol.12 No. 1.
 _____ . 2018. "Pluralis, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah." *Studia Islamika*. Vol. 25, No. 3.
 Elhady, Aminullah. 2017. "Islamic Reform Movement in Indonesia: Role of Muhammadiyah in Social Empowerment." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7 - No. 8.
 Ichwan, Moch Nur. 2016. "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang". *Maarif*. Vol 11 No. 2.
 Nur, Abdurrohik. 2017 "Konstelasi Kelompok Kepentingan: Studi Kasus Aksi Bela Islam 411

- (4 November 2016) di Jakarta". *Jurnal Fisip Unair*.
- Syamsuddin, Muh. 2017. "Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme: Sebuah Landasan Normatif-Institusional." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol 1, No. 2.
- Tahir, Gustia. 2010. "Muhammadiyah: Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan." *Jurnal Adabiyah*. Vol. X – Nomor 2.
- Qodir, Zuly. 2016. "Muhammadiyah dan Aksi Damai Bela Islam: Rejuvenasi Politik Umat Islam?" *Maarif*. Vol. 11, No. 2.
- _____. 2017. "Radikalisme Agama, Muhammadiyah dan Populisme Islam". *Maarif*. Vol. 12, No. 1.